



The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Zainul Abidin

Research Associate -
The Reform Initiative (TRI)

Outsourcing Kekuasaan

Malam itu saya tidak sedang mencari berita, hanya rebahan sambil membuka Instagram yang mungkin seperti jutaan orang lain yang mengisi setengah jam sebelum tidur dengan cara yang sama. Seorang influencer baru saja mengunggah video pendek tentang kebijakan pemerintah yang menurutnya keliru, disampaikan dengan nada yang biasa saja dan tidak provokatif, lalu saya menggeser ke kolom komentar seperti kebiasaan buruk yang sudah lama tidak bisa saya hentikan. Ratusan komentar sudah menumpuk dalam hitungan menit, semuanya berisi serangan atas orangnya, bukan tanggapan atas argumennya. Motifnya dipertanyakan, karakternya dibongkar, ada yang menyebutnya dibayar asing, dan bahkan ada yang memintanya pindah negara saja. Yang membuat saya bertahan membaca dan memperhatikan bukan kekerasannya, melainkan kemiripannya yang ganjil, pilihan kata yang berulang dan struktur kalimat yang hampir identik satu sama lain, seperti seseorang menulis satu komentar lalu menekan tombol salin sebanyak dua ratus kali.

Keesokan malamnya saya membuka di TikTok dan menemukan seorang kreator konten yang sedang memperkenalkan program pemerintah dengan video yang rapi dan musik yang optimis, dan kolom komentarnya dipenuhi pujian yang mengalir, terima kasih yang tulus, serta pernyataan bangga menjadi rakyat Indonesia. Saya membaca beberapa, lalu beberapa lagi, dan perlahan menyadari bahwa pola serta nada seluruh komentar itu persis seperti malam sebelumnya, hanya arahnya yang terbalik, kekaguman yang diseragamkan sebagai ganti kebencian yang diseragamkan.

Di Threads saya menemukan hal yang serupa dalam bentuk konten, beberapa akun berbeda mengunggah narasi yang hampir sama dalam rentang waktu berdekatan, seolah masing-masing sedang mengerjakan tugas dari satu briefing yang sama sambil berpura-pura tidak saling kenal. Tentu ini bukan satu malam yang ganjil, ini terjadi hampir setiap hari, dan setiap kali saya melihatnya saya tidak bisa tidak bertanya: apakah yang saya saksikan adalah opini publik, atau opini yang sedang dipentaskan?

Untuk memahami mengapa fenomena itu terasa begitu rapi dan terorganisir, kita perlu mundur sedikit dan melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar kolom komentar. Selama satu dekade terakhir, platform digital telah menciptakan sebuah ekosistem kerja yang sama sekali baru, ekosistem yang menghidupi jutaan orang Indonesia dengan satu keahlian pokok: 'memproduksi perhatian'. Seorang kreator konten belajar jam berapa audiensnya paling aktif, kata-kata apa yang memicu orang berhenti menggulir layar, emosi mana yang paling cepat mendorong seseorang menekan tombol bagikan. Seorang affiliate marketer belajar bagaimana mengemas sebuah produk menjadi kebutuhan yang terasa mendesak. Seorang pengelola akun media sosial sebuah merek belajar bagaimana membuat satu narasi terasa seperti percakapan yang hangat dan spontan, padahal ia sudah dirancang sejak pagi di sebuah spreadsheet.

Saya menilai platform-platform itu sendiri yang mengajarkan semua ini melalui algoritmanya yang bekerja secara diam-diam. Konten yang memancing kemarahan mendapat lebih banyak komentar, konten yang membangkitkan rasa takut disebarluaskan, konten yang membuat orang merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok mendapat lebih banyak tanda suka. Algoritma tidak pernah peduli apakah sebuah konten benar atau salah, algoritma hanya menghitung berapa lama seseorang bertahan menontonnya. Dalam lingkungan seperti ini, siapapun yang ingin bertahan dan menghasilkan uang dari platform digital yang mereka pertingkan bukan kebenaran, namun resonansi.

Keahlian yang dilatih oleh platform dalam memainkan emosi, memviralkan isu, mengatur persepsi, ternyata adalah keahlian yang paling dibutuhkan oleh industri Buzzer politik. Bukan kebetulan bahwa kedua industri ini tumbuh beriringan. Keduanya membutuhkan orang yang paham cara kerja algoritma, yang tahu bagaimana sebuah pesan harus dikemas agar terasa organik, yang mampu memproduksi konten dalam volume besar dengan biaya kecil. Sehingga tidak berat saya menyimpulkan bahwa Buzzer bukan anomali yang muncul dari kegelapan, ia adalah produk alami dari ekosistem yang kita bangun bersama dan kita ikuti setiap harinya.

Kekuasaan selalu membutuhkan persetujuan publik untuk bisa bertahan, dan sepanjang sejarah ia selalu mencari cara paling efisien untuk memproduksi persetujuan itu. Di era sebelumnya, kekuasaan membutuhkan institusi besar dan mahal: koran yang dikontrol, stasiun televisi yang dikelola, departemen penerangan yang dibiayai negara. Semua itu membutuhkan birokrasi, infrastruktur, dan jejak yang mudah dilacak. Kini semua itu tidak lagi diperlukan. Cukup dengan menyewa ratusan akun dengan tarif yang lebih murah dari upah minimum regional, membagikan briefing lewat grup Telegram yang bisa dihapus kapan saja, dan membiarkan algoritma mengerjakan sisanya.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana kekuasaan berhasil melakukan outsourcing atas fungsi yang dulu paling mahal dan paling berisiko, yakni fungsi membangun legitimasi. Dengan memindahkan pekerjaan itu ke tangan ribuan individu yang bekerja secara terpencar, anonim, dan bisa diingkari kapan saja, kekuasaan berhasil memisahkan dirinya dari jejak yang bisa digugat.

Yang membuat situasi ini terasa seperti ironi besar adalah janji awal yang dibawa oleh media sosial itu sendiri. Ketika platform-platform ini pertama kali tumbuh, narasi yang paling sering diulang adalah narasi tentang demokratisasi suara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kata mereka, setiap orang punya megafon. Kekuasaan tidak bisa lagi memonopoli narasi karena setiap warga bisa berbicara langsung kepada publik tanpa perantara. Seorang aktivis di desa terpencil bisa menjangkau jutaan orang dengan sebuah unggahan. Sebuah gerakan bisa lahir dari sebuah tagar. Inilah revolusi komunikasi yang sesungguhnya.

Kendati demikian, justru infrastruktur yang dibangun untuk membebaskan suara itu yang kemudian membuat manipulasi suara menjadi begitu murah, begitu cepat, dan begitu sulit untuk dilacak. Demokratisasi alat produksi opini ternyata sekaligus berarti demokratisasi alat produksi kebohongan. Senjata yang dirancang untuk melawan monopoli narasi kini bisa disewa untuk memproduksinya kembali, hanya saja kali ini monopoli itu tampil dengan wajah kerumunan. Ia terlihat seperti suara rakyat, padahal ia adalah suara yang dibeli secara eceran.

Tentu ada yang akan berargumen bahwa ini semua sulit dibuktikan, bahwa kita tidak bisa tahu dengan pasti mana komentar organik dan mana yang tidak, bahwa tuduhan koordinasi bisa menjadi cara mudah untuk mendiskreditkan opini yang tidak kita sukai. Argumen itu tidak sepenuhnya salah. Tapi ketidakmampuan membuktikan bukan berarti ketidakmampuan melihat. Dan apa yang terlihat di kolom komentar setiap hari, pola yang terlalu seragam, serangan yang terlalu terkoordinasi, pujian yang terlalu kompak, adalah sesuatu yang sulit dijelaskan oleh kebetulan semata.

Pertanyaan yang lebih penting bagi kita mungkin bukan siapa yang mendalangi ini semua, namun mengapa kita terus menyediakan tanahnya. Selama kita menilai sebuah opini dari seberapa viral ia beredar dan bukan dari seberapa jujur ia dibangun, selama kita membiarkan algoritma memutuskan apa yang layak didengar dan apa yang tidak, kita semua adalah bagian dari pasar yang sama yang menopang industri ini. Buzzer tidak bekerja di ruang hampa. Ia bekerja di ekosistem yang kita huni bersama, setiap hari, setengah jam sebelum tidur.